

## **Perbandingan Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlemerter Dalam Pengambilan Kebijakan Publik**

**Miftakhul Jannah Hasny<sup>1</sup>, Dirma Wardatul Rizki<sup>2</sup>, Muhammad Adha<sup>3</sup>, Nurul Kamaly<sup>4</sup>, Siti Aminah<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia

\*Korespondensi : [nurulkamaly@usk.ac.id](mailto:nurulkamaly@usk.ac.id)

Received: 8 April 2026

Revised: 15 April 2026

Accepted: 25 April 2026

Published: 30 April 2026

### **Abstract**

*This study aims to comparatively analyze the effectiveness of presidential and parliamentary systems of government in public policymaking. Differences in institutional design between the two systems, particularly in the relationship between the executive and legislative branches, are key factors influencing the speed, stability, and quality of the resulting policies. This study employed a qualitative approach with library research, utilizing secondary data sourced from scientific literature, reference books, and reports from relevant international institutions. The results indicate that parliamentary systems tend to be more effective in producing responsive and efficient public policies, supported by the fusion of powers mechanism between the executive and legislative branches. Conversely, presidential systems demonstrate superior leadership stability through fixed terms, but are susceptible to political deadlock due to the rigidity of the separation of powers, particularly in multiparty systems. Furthermore, the effectiveness of both systems is also influenced by intervening variables such as the party system, coalition stability, political culture, and bureaucratic capacity to implement public policy. The findings of this study confirm that the effectiveness of public policy is not solely determined by the typology of the government system, but rather by institutional capacity and the ability of political actors to adaptively manage power dynamics. Therefore, strengthening institutional design and reforming governance are necessary to achieve effective, accountable, and sustainable public policy.*

**Keywords:** *Presidential System; Parliamentary System; Public Policy; Government Effectiveness; Institutional Design.*

### **Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif efektivitas sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam pembuatan kebijakan publik. Perbedaan dalam desain kelembagaan antara kedua sistem tersebut, khususnya dalam hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif, merupakan faktor kunci yang memengaruhi kecepatan, stabilitas, dan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan riset pustaka, memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, buku referensi, dan laporan dari lembaga internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem parlementer cenderung lebih efektif dalam menghasilkan kebijakan publik yang responsif dan efisien, didukung oleh mekanisme fusi kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, sistem presidensial menunjukkan stabilitas kepemimpinan yang lebih unggul melalui masa jabatan tetap, tetapi rentan terhadap kebuntuan politik karena kekakuan pemisahan kekuasaan, khususnya dalam sistem multipartai. Lebih lanjut, efektivitas kedua sistem tersebut juga dipengaruhi oleh variabel-variabel perantara seperti sistem partai, stabilitas koalisi, budaya politik, dan kapasitas birokrasi untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Temuan studi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tipologi sistem pemerintahan, tetapi lebih oleh kapasitas kelembagaan dan kemampuan aktor politik untuk secara adaptif mengelola dinamika kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan desain kelembagaan dan reformasi tata kelola diperlukan untuk mencapai kebijakan publik yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Sistem Presidensial; Sistem Parlemerter; Kebijakan Publik; Efektivitas Pemerintah; Desain Kelembagaan.



Copyright © 2026 by Author. This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License \(CC BY-SA\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## 1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan merupakan variabel institusional paling menentukan dalam memetakan arah kebijakan publik sebuah negara. Perdebatan mengenai efektivitas sistem presidensial dan parlementer dalam diskursus ilmu politik kontemporer sering kali berfokus pada kemampuan masing-masing sistem dalam merespons krisis serta mengeksekusi agenda pembangunan. Struktur kekuasaan memengaruhi kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan sebagai masalah mendasar dalam tata kelola negara. Sistem presidensial yang mengandalkan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) sering kali terjebak dalam kondisi kebuntuan politik (*deadlock*) apabila presiden tidak memiliki dukungan mayoritas di lembaga legislatif (Chaisty et al., 2019). Evaluasi mendalam terhadap desain institusional yang mampu meminimalisasi hambatan birokrasi dan politik dalam perumusan kebijakan publik menjadi urgensi utama penelitian ini. Efektivitas kebijakan merupakan determinan utama bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi negara.

Data empiris menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik memiliki korelasi kuat dengan tingkat kemudahan eksekutif dalam meloloskan rancangan undang-undang. Negara dengan sistem parlementer cenderung memiliki durasi pembahasan legislasi yang lebih singkat dibandingkan negara presidensial dengan sistem multipartai menurut data Inter-Parliamentary Union (IPU). Sinkronisasi antara kabinet dan parlemen di sistem parlementer murni, seperti Inggris, memungkinkan kebijakan strategis diputuskan secara cepat karena perdana menteri merupakan pemimpin mayoritas parlemen. Contoh kasus di Amerika Serikat sebagai representasi sistem presidensial sebaliknya sering memperlihatkan fenomena *government shutdown* ketika kesepakatan anggaran antara Presiden dan Kongres gagal tercapai. Pemisahan kekuasaan yang terlalu kaku dapat menjadi penghambat bagi keberlangsungan pelayanan publik dan implementasi kebijakan strategis nasional.

Tinjauan pustaka mengenai efektivitas pemerintahan kontemporer tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Power dan Power (2020) yang menyatakan bahwa sistem presidensial menghadapi tantangan stabilitas besar dalam lingkungan politik multipartai. Persaingan antarpolitical yang tajam di parlemen memaksa presiden melakukan kompromi politik yang sering kali melemahkan substansi kebijakan publik itu sendiri. Raunio dan Sedelius (2019) di sisi lain mengemukakan bahwa sistem parlementer lebih unggul dalam menciptakan demokrasi konsensus yang inklusif melalui penyatuan kekuasaan. Mekanisme pertanggungjawaban langsung pemerintah kepada parlemen memastikan setiap kebijakan publik yang dihasilkan telah melalui proses filtrasi politik yang representatif namun tetap efisien. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa sistem pemerintahan parlementer memiliki tingkat efektivitas

pengambilan kebijakan yang lebih tinggi dibandingkan sistem presidensial dalam kondisi politik yang terfragmentasi. Penyatuan kekuasaan (*fusion of powers*) dalam sistem parlementer secara alami mereduksi gesekan antarlembaga yang menghambat proses pengambilan keputusan publik.

Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk membedah secara komparatif mekanisme pengambilan kebijakan publik pada kedua sistem pemerintahan tersebut guna menemukan pola desain institusional yang paling adaptif. Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik studi komparatif makro. Peneliti akan menganalisis data sekunder terkait indeks efektivitas pemerintahan (*Government Effectiveness Index*) yang dirilis oleh Bank Dunia, kemudian menyandingkannya dengan dinamika politik di beberapa negara sampel. Analisis akan difokuskan pada variabel hambatan legislasi, stabilitas masa jabatan eksekutif, dan konsistensi kebijakan jangka panjang. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang mampu menyeimbangkan antara prinsip pengawasan (*checks and balances*) dan kebutuhan akan pengambilan keputusan yang tangkas (*agile decision making*).

Keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya bergantung pada substansi teknis, tetapi juga pada ekosistem politik yang mendukungnya. Penelitian juga akan mengeksplorasi peran partai politik sebagai jembatan komunikasi antara rakyat dan pembuat kebijakan. Pengabaian terhadap aspek kelembagaan ini sering kali menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan di lapangan, meskipun secara administratif kebijakan tersebut telah disahkan. Studi ini memiliki urgensi akademis untuk memberikan pemahaman baru bagi para pemangku kepentingan mengenai pentingnya reformasi institusional. Sintesis antara teori kelembagaan dan realitas politik praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif komparatif. Fokus utama penelitian terletak pada penelaahan literatur dan dokumen relevan mengenai efektivitas sistem presidensial dan parlementer. Mekanisme pengambilan kebijakan publik menjadi objek material, sementara desain institusional kedua sistem pemerintahan bertindak sebagai objek formal. Analisis dilakukan terhadap data publikasi rentang tahun 2016 hingga 2026 guna memperoleh gambaran kontemporer dinamika politik global. Sintesis teori besar dengan data makro-institusional publik menjadikan metode kepustakaan sebagai pilihan paling tepat untuk mencapai tujuan penelitian.

Jenis data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder bersifat dokumenter. Sumber data primer meliputi teks konstitusi negara sampel, naskah kebijakan publik, dan laporan resmi lembaga internasional seperti Government Effectiveness Index milik Bank Dunia. Sumber data sekunder mencakup buku teks ilmu politik serta jurnal ilmiah bereputasi yang membahas perbandingan sistem pemerintahan secara kritis. Peneliti menyeleksi literatur dengan otoritas tinggi yang memiliki relevansi langsung terhadap variabel kecepatan legislasi dan stabilitas eksekutif. Prinsip kejujuran akademik dan akurasi sumber senantiasa diterapkan guna menjaga reliabilitas temuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi menggunakan instrumen pencarian literatur digital maupun fisik. Peneliti menerapkan teknik purposive sampling untuk menyaring literatur yang secara spesifik mengkaji perbandingan sistem pemerintahan. Proses pengumpulan dimulai dengan inventarisasi karya kontemporer seperti pemikiran Chaisty et al. (2019) mengenai presidensialisme koalisi dan Raunio (2019) terkait dinamika parlementer. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data kasar dari catatan tertulis selama proses telaah literatur menjadi informasi yang lebih terfokus.

Metode analisis data menerapkan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif konstan. Peneliti membedah setiap unit informasi untuk menemukan pola hubungan antara bentuk pemerintahan dan efektivitas kebijakan publik. Tahapan analisis dimulai dengan kategorisasi hambatan institusional, dilanjutkan penyandingan temuan antara sistem presidensial dan parlementer dalam proses pengambilan keputusan. Teknik triangulasi teori digunakan untuk membandingkan berbagai perspektif guna mendapatkan kesimpulan komprehensif. Prosedur deduktif pada tahap akhir menarik premis umum sistem pemerintahan ke dalam fakta khusus efektivitas kebijakan publik secara sistematis.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Analisis Komparatif Mekanisme Pengambilan Kebijakan Publik pada Sistem Presidensial dan Parlementer**

Struktur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan determinan utama yang menentukan kelancaran proses pengambilan kebijakan publik. Sistem presidensial dan parlementer memiliki logika institusional yang berbeda dalam mengelola konflik serta kerja sama antarlembaga negara. Mekanisme pengambilan kebijakan pada sistem presidensial sangat bergantung pada kemandirian masing-masing lembaga yang didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).

Presiden memiliki mandat rakyat yang terpisah dari parlemen, sehingga kebijakan publik sering kali menjadi arena kontestasi kepentingan yang tajam. Kondisi ini sering kali diperumit oleh fenomena *divided government*, di mana presiden menghadapi parlemen yang dikuasai oleh partai oposisi. Chaisty et al. (2019) dalam studinya mengenai koalisi presidensial menyebutkan bahwa presiden di berbagai negara sering kali dipaksa menggunakan "alat pertukaran" (*exchange tools*) seperti alokasi anggaran atau jabatan kabinet demi mengamankan dukungan legislasi. Tanpa dukungan mayoritas yang solid, proses transformasi agenda politik menjadi kebijakan publik akan mengalami hambatan birokrasi yang berkepanjangan.

Kecepatan pengambilan keputusan dalam sistem presidensial juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan hak veto. Presiden memiliki otoritas konstitusional untuk menolak rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, yang pada gilirannya dapat menghentikan roda pemerintahan jika tidak tercapai kompromi. Penelitian terbaru dari Hiroi dan Renno (2021) menunjukkan bahwa hambatan legislasi dalam sistem presidensial cenderung meningkat ketika terjadi polarisasi ideologi yang ekstrem di tingkat elit. Polarisasi ini menyebabkan proses negosiasi menjadi sangat alot dan transaksional, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali merupakan produk kompromi minimal yang kurang menyentuh akar permasalahan publik. Data empiris dari berbagai negara presidensial menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan undang-undang strategis jauh lebih lama dibandingkan dengan sistem yang memiliki penyatuan kekuasaan. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme *checks and balances* yang kuat, meskipun baik untuk mencegah otoritarianisme, sering kali harus dibayar dengan inefisiensi dalam manajemen kebijakan publik.

Sistem pemerintahan parlementer menawarkan mekanisme yang berbeda melalui prinsip penyatuan kekuasaan (*fusion of powers*). Perdana menteri sebagai kepala pemerintahan secara otomatis merupakan pemimpin dari partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Struktur ini memungkinkan sinkronisasi yang sangat erat antara agenda eksekutif dan legislatif dalam perumusan kebijakan publik. Rasch dan Martin (2019) menjelaskan bahwa dalam sistem parlementer, kebijakan pemerintah hampir selalu mendapatkan jaminan dukungan dari parlemen karena adanya ancaman mosi tidak percaya. Ketidakmampuan parlemen untuk meloloskan agenda utama pemerintah dapat berujung pada jatuhnya kabinet atau pembubaran parlemen itu sendiri. Insentif institusional ini memaksa partai-partai pendukung pemerintah untuk tetap disiplin dan solid dalam mendukung setiap kebijakan yang diajukan oleh perdana menteri. Akibatnya, durasi pembahasan kebijakan publik dalam sistem parlementer cenderung lebih singkat dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Efektivitas pengambilan kebijakan dalam sistem parlementer juga didukung oleh tradisi tanggung jawab kolektif kabinet. Setiap kebijakan publik yang diputuskan di

tingkat kementerian telah melalui proses filtrasi internal yang ketat sebelum diajukan ke parlemen. Ganguly (2020) menyatakan bahwa sistem parlementer memiliki keunggulan dalam menciptakan kebijakan yang lebih koheren karena arah kebijakan ditentukan oleh satu komando yang selaras dengan mayoritas legislatif. Namun, efektivitas ini terkadang mengabaikan peran pengawasan dari kelompok minoritas di parlemen. Karena pemerintah memegang kendali penuh, ruang untuk perdebatan publik yang mendalam sering kali terbatas demi mengejar kecepatan legislasi. Realitas ini menunjukkan bahwa sistem parlementer sangat mengutamakan efisiensi eksekusi, namun memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan dan keterwakilan aspirasi yang beragam.

Perbandingan kedua sistem ini menunjukkan bahwa variabel stabilitas dan efisiensi berada pada spektrum yang berbeda. Sistem presidensial memberikan kepastian masa jabatan bagi eksekutif, namun sering kali mengorbankan kecepatan pengambilan keputusan akibat gesekan antarlembaga. Di sisi lain, sistem parlementer menawarkan efisiensi tinggi dalam produksi kebijakan publik, tetapi sangat bergantung pada stabilitas koalisi partai di parlemen. Penelitian dari Cheibub et al. (2020) menegaskan bahwa kinerja kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana aturan formal pemerintahan berinteraksi dengan perilaku aktor politik. Jika sistem presidensial gagal mengelola hubungan dengan parlemen melalui negosiasi yang efektif, maka pemerintahan tersebut akan terjebak dalam stagnasi kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Sebaliknya, sistem parlementer yang gagal menjaga soliditas koalisi akan sering mengalami pergantian kabinet yang mengganggu kontinuitas kebijakan jangka panjang.

Analisis kepustakaan ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengambilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh label sistemnya, melainkan oleh kematangan institusional dalam mengelola konflik kepentingan. Sistem parlementer secara struktural lebih unggul dalam hal kecepatan legislasi dan penyelarasan agenda pemerintah. Sementara itu, sistem presidensial memerlukan kepemimpinan yang mampu menjembatani perbedaan antara eksekutif dan legislatif tanpa melalui mekanisme mosi tidak percaya. Urgensi dari pemahaman komparatif ini sangat relevan bagi negara-negara yang tengah melakukan reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan negara. Memilih desain institusional yang tepat berarti menyeimbangkan antara kebutuhan akan pengambilan keputusan yang tangkas dan kebutuhan akan pengawasan kekuasaan yang demokratis. Penataan ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, stabil, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan warga negara.

## **b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Sistem Pemerintahan dalam Pengambilan Keputusan**

Efektivitas sebuah sistem pemerintahan dalam memproduksi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh struktur konstitusionalnya, melainkan juga oleh interaksi kompleks antara berbagai variabel politik dan institusional. Sistem kepartaian merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi kinerja pengambilan keputusan di tingkat nasional. Dalam sistem presidensial, keberadaan sistem multipartai yang terfragmentasi sering kali menjadi hambatan utama bagi presiden untuk mengeksekusi agenda kebijakan. Penelitian terbaru dari Power dan Power (2020) menunjukkan bahwa presiden di negara dengan banyak partai politik di parlemen cenderung menghadapi biaya transaksi yang sangat tinggi untuk membangun koalisi legislatif. Kondisi ini menuntut presiden memiliki kapasitas negosiasi yang luar biasa guna menghindari kebuntuan politik. Sebaliknya, sistem presidensial dengan sistem dua partai cenderung lebih stabil karena polarisasi kekuasaan menjadi lebih sederhana, meskipun tetap menyimpan risiko kebuntuan jika tidak ada titik temu ideologi.

Fragmentasi politik dalam parlemen sering kali memaksa terjadinya praktik "koalisi presidensial" yang bersifat pragmatis dan transaksional. Alston et al. (2021) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan pada sistem presidensial sangat bergantung pada kemampuan presiden dalam mengelola insentif bagi anggota parlemen. Jika presiden gagal mendistribusikan pengaruh atau sumber daya secara merata kepada partai-partai koalisi, maka kebijakan strategis seperti anggaran tahunan dapat tertahan selama berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas kebijakan pada sistem presidensial bersifat rentan karena tidak didukung oleh mekanisme pertanggungjawaban kolektif sebagaimana dalam sistem parlementer. Fenomena ini membuktikan bahwa efektivitas bukan sekadar masalah desain hukum dasar, tetapi juga mengenai bagaimana aktor politik menavigasi kepentingan kelompok di dalam lembaga legislatif.

Sistem pemerintahan parlementer memiliki faktor penentu efektivitas yang berbeda, yakni tingkat kedisiplinan partai dan stabilitas koalisi kabinet. Pemerintah dalam sistem parlementer hanya dapat bertahan selama mereka memegang kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Lupu dan Riedl (2023) dalam studinya mengenai stabilitas pemerintahan menekankan bahwa kedisiplinan fraksi merupakan kunci utama bagi kecepatan pengambilan keputusan publik. Partai-partai dalam sistem parlementer biasanya memiliki tingkat kohesi yang lebih tinggi dibandingkan partai dalam sistem presidensial. Anggota parlemen dari partai pendukung pemerintah hampir selalu memberikan suara yang selaras dengan kebijakan perdana menteri guna menjaga kelangsungan kabinet. Mekanisme ini secara otomatis mereduksi hambatan birokrasi

---

dan politik dalam proses legislasi, sehingga kebijakan dapat disahkan dalam waktu yang relatif singkat.

Budaya politik dan penegakan etika publik juga menjadi faktor non-institusional yang sangat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan. Negara-negara dengan budaya politik konsensus, seperti yang ditemukan di sebagian besar sistem parlementer Eropa Utara, menunjukkan efektivitas kebijakan yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara dengan budaya politik konfrontatif. Fortunato (2021) menyebutkan bahwa transparansi dalam proses negosiasi koalisi di sistem parlementer membantu meminimalisasi ketidakpastian kebijakan bagi masyarakat dan investor. Di sisi lain, sistem presidensial yang didukung oleh penegakan hukum yang lemah sering kali terjebak dalam praktik korupsi legislatif demi meloloskan kebijakan. Realitas ini menegaskan bahwa integritas aktor politik merupakan variabel pendukung yang menentukan apakah sebuah desain sistem pemerintahan dapat bekerja secara optimal atau justru menjadi alat bagi kepentingan elit semata.

Variabel lain yang tidak kalah penting adalah kapasitas birokrasi dalam menerjemahkan keputusan politik menjadi langkah-langkah implementatif yang nyata. Efektivitas pengambilan keputusan di tingkat atas tidak akan berarti banyak jika birokrasi tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten. Peters (2022) menyatakan bahwa sistem parlementer sering kali memiliki keunggulan dalam koordinasi antara menteri dan birokrasi karena adanya garis komando yang lebih jelas dari parlemen ke eksekutif. Sementara itu, sistem presidensial terkadang menghadapi kendala koordinasi horizontal antar-kementerian yang memiliki loyalitas politik berbeda-beda. Ketidaksinkronan ini dapat menyebabkan kebijakan yang sudah disahkan di tingkat legislatif mengalami kegagalan saat memasuki tahap eksekusi di lapangan. Sinergi antara kepemimpinan politik dan profesionalisme birokrasi menjadi faktor krusial yang menentukan output akhir dari sebuah kebijakan publik.

Sintesis dari berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan merupakan hasil dari keselarasan antara aturan formal dan praktik politik informal. Sistem parlementer menawarkan keunggulan dalam kecepatan melalui disiplin partai dan penyatuan kekuasaan, namun sangat bergantung pada keutuhan koalisi. Sistem presidensial menawarkan stabilitas kepemimpinan tetap, namun memerlukan seni negosiasi yang tinggi untuk mengatasi fragmentasi di parlemen. Penelusuran kepustakaan ini menyimpulkan bahwa penguatan institusi partai politik dan peningkatan profesionalisme birokrasi adalah langkah yang tidak dapat ditawar bagi negara mana pun, terlepas dari sistem pemerintahan yang dianutnya. Fokus pada perbaikan faktor-faktor pendukung ini akan memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan publik

dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang.

### **C. Strategi Penguatan Tata Kelola dan Sintesis Model Desain Institusional yang Adaptif**

Penguatan tata kelola pemerintahan dalam pengambilan kebijakan publik memerlukan sintesis antara keunggulan sistem presidensial dan parlementer guna meminimalisasi kelemahan masing-masing. Sistem presidensial sering kali menghadapi tantangan kebuntuan legislasi yang akut, sehingga diperlukan mekanisme institusional tambahan untuk menjembatani hubungan eksekutif dan legislatif. Penelitian terbaru dari Negretto (2021) menyarankan penerapan "koalisi berbasis program" yang lebih permanen daripada sekadar kerja sama taktis sesaat. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dukungan di parlemen tanpa mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi ciri khas presidensialisme. Melalui kesepakatan tertulis mengenai agenda kebijakan strategis, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program prioritas nasional tetap berjalan meskipun terjadi polarisasi politik di tingkat elit.

Peningkatan efektivitas pada sistem parlementer dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi koalisi. Stabilitas kabinet dalam sistem ini sering kali sangat bergantung pada dinamika partai politik yang terkadang mengabaikan kepentingan publik demi kepentingan kelompok. Studi dari Martin dan Vanberg (2020) menunjukkan bahwa penguatan peran komisi di parlemen untuk melakukan audit terhadap kebijakan pemerintah merupakan kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Mekanisme ini memastikan bahwa kecepatan pengambilan keputusan tidak mengorbankan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Integrasi antara efisiensi eksekutif dan pengawasan legislatif yang ketat akan melahirkan kebijakan publik yang lebih kredibel dan memiliki daya tahan tinggi terhadap perubahan kepemimpinan.

Transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan juga menjadi faktor krusial yang melintasi batas-batas sistem pemerintahan tradisional. Implementasi *E-Government* atau pemerintahan berbasis elektronik terbukti mampu mereduksi hambatan komunikasi antara lembaga eksekutif dan parlemen di berbagai negara. Dunleavy (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi proses legislasi mempercepat pertukaran data dan sinkronisasi draf kebijakan secara *real-time*. Keberadaan platform digital yang transparan memungkinkan publik untuk memantau setiap tahapan pengambilan keputusan, sehingga legitimasi kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Pemanfaatan teknologi ini secara efektif akan membantu sistem presidensial mengatasi kelambatan birokrasi dan membantu sistem parlementer dalam meningkatkan keterbukaan akses informasi bagi konstituen.

Sintesis model institusional yang ideal di masa depan harus mengedepankan prinsip kelenturan (*agility*) dalam menghadapi krisis global yang semakin tidak terprediksi. Sistem pemerintahan perlu memiliki protokol darurat yang jelas mengenai distribusi kewenangan saat menghadapi situasi luar biasa seperti pandemi atau krisis ekonomi hebat. Boin et al. (2021) menekankan bahwa efektivitas kebijakan di masa krisis sangat bergantung pada kejelasan garis komando dan kecepatan koordinasi lintas sektoral. Pengembangan kapasitas institusional melalui reformasi birokrasi yang meritokratis akan memberikan dukungan teknokratis yang kuat bagi siapa pun yang memegang kekuasaan politik. Hal ini memastikan bahwa kualitas kebijakan publik tetap terjaga secara konsisten tanpa terpengaruh secara berlebihan oleh fluktuasi politik di tingkat parlemen.

Penelitian kepustakaan ini akhirnya merumuskan bahwa penguatan efektivitas kebijakan publik memerlukan pendekatan holistik yang menyatukan aspek hukum, teknologi, dan budaya politik. Pilihan sistem pemerintahan hanyalah kerangka dasar, sementara keberhasilan operasionalnya ditentukan oleh kapasitas aktor politik dalam menjalankan fungsi-fungsi kolaboratif. Penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi menjadi agenda yang tidak dapat ditawar untuk mendukung sistem presidensial maupun parlementer. Partai politik yang memiliki ideologi kuat dan kaderisasi yang baik akan menghasilkan pemimpin serta anggota parlemen yang lebih mengutamakan kemaslahatan publik daripada kepentingan pragmatis. Sinergi antara desain institusional yang kokoh dan integritas aktor politik merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu menghasilkan kebijakan publik yang unggul dan berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat. Kerangka teori ini merupakan peta jalan penelitian yang mengaitkan variabel sistem pemerintahan sebagai determinan utama dengan efektivitas pengambilan kebijakan publik. Berdasarkan judul penelitian, kerangka ini akan berfokus pada mekanisme hubungan antarlembaga (eksekutif-legislatif) dan struktur insentif politik yang memengaruhi kecepatan serta kualitas output kebijakan dalam sistem presidensial dan parlementer.

**Tabel 1. Variabel dan Konsep Kunci**

Konsep Kunci	Definisi konseptual	Referensi
Sistem Presidensial	Sistem pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan yang tegas, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan memiliki mandat mandiri dari legislatif.	Chaisty, P., et al. (2019). <i>Coalitional Presidentialism</i> . Oxford University Press.
Sistem Parlementer	Sistem pemerintahan dengan penyatuan kekuasaan ( <i>fusion of powers</i> ), di mana eksekutif bertanggung jawab secara	Raunio, T., & Sedelius, T. (2019). <i>Shifting Power in Systems</i> . Palgrave Macmillan.
Kebijakan Publik	Hasil dari pilihan strategis pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan dalam merespons masalah publik.	Knill, C., & Tosun, J. (2020). <i>Public Policy: A New Introduction</i> . Red Globe Press.
Efektivitas Kebijakan	Kinerja sistem politik dalam menghasilkan output kebijakan yang stabil, tepat waktu, dan memiliki daya implementasi yang tinggi.	Peters, B. G. (2022). <i>The Politics of Bureaucracy</i> . Routledge.
Checks and Balances	Mekanisme kontrol antarlembaga negara untuk memastikan akuntabilitas, meskipun sering bersinggungan dengan efisiensi pengambilan keputusan.	Power, T. J., & Power, M. M. (2020). <i>The Logic of Presidentialism</i> . Oxford University Press.

Sumber: Diolah Peneliti dari berbagai sumber literatur, 2026.

Guna mendukung pemecahan masalah, penelitian ini menggunakan Teori Institusionalisme Baru (New Institutionalism) dan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice) untuk menjelaskan bagaimana aturan formal dalam sistem pemerintahan memengaruhi perilaku aktor politik dalam pengambilan keputusan.

### **Mekanisme Kelembagaan dan Hambatan Politik (Faktor Struktural)**

Efektivitas kebijakan publik secara fundamental dipengaruhi oleh desain konstitusional yang mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensial, keberadaan legitimasi ganda sering kali menciptakan ketegangan politik yang tajam karena baik presiden maupun parlemen sama-sama memiliki mandat langsung dari rakyat. Kondisi ini berpotensi memicu konflik kepentingan yang menghambat proses pengambilan keputusan strategis. Sebaliknya, sistem parlementer mengandalkan mekanisme mosi tidak percaya sebagai instrumen kontrol yang efektif

sekaligus pendorong bagi pemerintah untuk senantiasa selaras dengan mayoritas parlemen. Sinergi institusional dalam sistem parlementer memungkinkan kelangsungan kebijakan berjalan lebih stabil karena eksekutif merupakan bagian integral dari kekuatan legislatif.

### **Peran Sistem Kepartaian**

Sistem pemerintahan tidak beroperasi dalam ruang hampa karena kinerjanya sangat ditentukan oleh konfigurasi partai politik yang ada di parlemen. Sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai cenderung melahirkan fenomena presidensi minoritas yang sangat rentan terhadap hambatan legislasi. Dalam situasi tersebut, presiden sering kali terpaksa melakukan negosiasi politik yang bersifat transaksional dan memakan waktu lama hanya untuk meloloskan sebuah kebijakan publik. Hal ini sangat berbeda dengan sistem parlementer mayoritarian yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara sangat cepat. Kontrol tunggal atas lembaga eksekutif dan legislatif oleh partai atau koalisi mayoritas meminimalisasi gesekan politik sehingga proses transformasi agenda politik menjadi kebijakan publik dapat berjalan lebih efisien.

### **Manifestasi Efektivitas Pengambilan Kebijakan (Output)**

Efektivitas dalam penelitian ini diukur melalui tiga dimensi utama yang saling berinteraksi untuk menentukan kualitas keluaran politik. Dimensi temporal atau kecepatan menjadi indikator sejauh mana proses legislasi dan eksekusi kebijakan dapat dilakukan tanpa penundaan yang berarti akibat kebuntuan politik. Selain kecepatan, dimensi stabilitas juga menjadi parameter krusial untuk melihat konsistensi kebijakan dalam jangka panjang serta ketahanannya terhadap fluktuasi perubahan politik jangka pendek. Dimensi ketiga adalah responsivitas yang mengukur kemampuan sistem pemerintahan dalam menerjemahkan aspirasi serta kebutuhan mendesak publik menjadi produk hukum yang aplikatif. Ketiga dimensi ini secara kolektif menggambarkan sejauh mana sebuah sistem pemerintahan mampu memenuhi fungsi dasarnya dalam mengelola urusan publik secara optimal.

### **Konsekuensi Desain Sistem terhadap Kualitas Tata Kelola**

Perbedaan desain sistem pemerintahan membawa dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Salah satu risiko terbesar dalam sistem presidensial adalah munculnya kebuntuan politik atau gridlock yang mengakibatkan stagnasi pada berbagai program pembangunan nasional. Masalah ini sering kali berakar pada ketiadaan mekanisme formal untuk menyelesaikan perselisihan antara presiden dan parlemen di luar masa pemilu.

Di sisi lain, aspek akuntabilitas menunjukkan perbedaan kontras di mana sistem parlementer menawarkan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih langsung dan seketika melalui parlemen. Sementara itu, pejabat dalam sistem presidensial cenderung lebih terlindungi oleh kepastian masa jabatan tetap (*fixed term*), yang meskipun memberikan stabilitas durasi kepemimpinan, terkadang mengurangi fleksibilitas sistem dalam merespons penurunan kepercayaan publik di tengah masa jabatan. Berdasarkan pendekatan tersebut, hubungan antar variabel dalam penelitian ini disintesis dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Hubungan Antar Variabel**

Variabel Eksogen (Fokus Penelitian)	Variabel Intervening (Mekanisme Mediasi)	Variabel Endogen (Output Kebijakan)
Sistem Pemerintahan (Presidensial vs Parlementer)	Struktur Kepartaian (Multipartai vs Dua Partai)	Efektivitas Kebijakan Publik (Kecepatan & Ketepatan)
Mekanisme <i>Checks and Balances</i>	Mekanisme <i>Fusion of Powers vs Separation of Powers</i>	Tingkat Kebuntuan Politik ( <i>Deadlock</i> )
Aturan Konstitusional (Hak Veto, Mosi Tidak Percaya)	Dinamika Koalisi dan Dukungan Parlemen	Stabilitas Implementasi Program Nasional

Sumber: Diolah Peneliti dari berbagai sumber literatur, 2026.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan parlementer secara relatif lebih unggul dalam aspek efektivitas pengambilan kebijakan publik, terutama dalam hal kecepatan legislasi dan konsistensi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya integrasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang mampu menciptakan harmonisasi agenda politik serta meminimalisasi potensi konflik institusional. Di sisi lain, sistem presidensial menawarkan stabilitas kepemimpinan melalui mekanisme masa jabatan tetap, namun menghadapi tantangan struktural berupa potensi kebuntuan politik yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem presidensial sangat bergantung pada kapasitas negosiasi politik serta kemampuan membangun koalisi yang solid di parlemen.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem pemerintahan merupakan hasil interaksi antara desain konstitusional dan variabel kontekstual, seperti sistem kepartaian, budaya politik, integritas aktor politik, serta kapasitas birokrasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas kebijakan publik perlu diarahkan pada penguatan institusi politik, reformasi birokrasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan desain institusional yang adaptif melalui

sintesis keunggulan sistem presidensial dan parlementer guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Alston, L. J., Mueller, B., Pereira, C., & Melo, M. A. (2021). *Brazil in Transition: Beliefs, Leadership, and Institutional Change*. Princeton University Press.
- Boin, A., Lodge, M., & Luesink, M. (2021). Learning from the COVID-19 Crisis: An Initial Analysis of National Responses. *Policy Design and Practice*, 4(2), 189-204.
- Chaisty, P., Cheeseman, N., & Power, T. J. (2019). *Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective: Minority Presidents in Multiparty Systems*. Oxford University Press.
- Cheibub, J. A., Elkins, Z., & Ginsburg, T. (2020). Government and Opposition. Dalam *The Oxford Handbook of Comparative Constitutions*. Oxford University Press.
- Dunleavy, P. (2022). *The Future of Digital Era Government: From Cyber-Optimism to Institutional Realism*. Palgrave Macmillan.
- Fortunato, D. (2021). *The Visible Hand: Governance and Public Policy in Parliamentary Democracies*. Cambridge University Press.
- Ganguly, R. (2020). *Parliamentary Systems and Policy Coherence: A Comparative Study*. Routledge.
- Hiroi, T., & Renno, L. (2021). Impediment or Impetus? Presidential Vetoes and Legislative Gridlock in Brazil. *Journal of Legislative Studies*, 27(1), 56-78.
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy: A New Introduction* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Lupu, N., & Riedl, R. B. (2023). *Party Systems and Policy Stability in New Democracies*. Cambridge University Press.
- Martin, L. W., & Vanberg, G. (2020). *Parliaments and Coalitions: The Role of Legislative Institutions in Multiparty Governments*. Oxford University Press.
- Negretto, G. L. (2021). *Constitutional Change and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Peters, B. G. (2022). *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration* (7th ed.). Routledge.
- Power, T. J., & Power, M. M. (2020). *The Logic of Presidentialism in Multiparty Settings*. Oxford University Press.
- Rasch, B. E., & Martin, S. (2019). *The Oxford Handbook of Legislative Studies*. Oxford University Press.
- Raunio, T., & Sedelius, T. (2019). *Shifting Power in Semi-Presidential Systems: European Comparative Perspectives*. Palgrave Macmillan.
- World Bank. (2024). *Government Effectiveness Index: Worldwide Governance Indicators*.